

Tinjauan Mata Kuliah

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, dan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan akan memberikan informasi kinerja pembangunan, khususnya pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan, dan kendala yang dihadapi, serta alternatif tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan pada periode berikutnya. Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sampai saat ini telah memberikan hasil pembangunan yang cukup baik. Dibandingkan dengan kondisi awal pada 2009, saat ini Indonesia telah menjadi negara yang lebih sejahtera dan lebih demokratis. Tantangan pembangunan di Indonesia sebagaimana adalah kemiskinan, pendidikan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pencapaian itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan di tengah kondisi ekonomi dunia yang melemah. Pengakuan dunia internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga, setelah India dan Amerika Serikat, dalam hal demokrasi adalah bukti keberhasilan Indonesia dalam pembangunan bidang politik.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan salah satu diantaranya adalah dalam hal penyediaan sumber pembiayaan pembangunan itu sendiri. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, berasal dari pemerintah maupun swasta.

Modul PWKL4406 Pembiayaan Pembangunan ini mempelajari tentang tentang konsep dasar dan tujuan pembangunan, perencanaan pembangunan, pengertian pembiayaan pembangunan, kedudukan pembiayaan pembangunan dalam perencanaan wilayah dan kota, sistem perencanaan dan penganggaran di Indonesia, sumber pembiayaan pembangunan, otonomi daerah, pemasaran kota, pelayanan publik, auditing dan pengendalian manajemen sektor publik, metode dan proses perencanaan pembiayaan pembangunan, metode dan analisis kelayakan proyek publik, perencanaan pembiayaan sektor pembangunan seperti bidang infrastruktur berdasarkan tinjauan teoritis, empiris, serta aturan normatif yang berlaku di Indonesia, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD..

Modul PWKL4406 Pembiayaan Pembangunan ini terdiri dari 6 (enam) modul, dengan bobot 2 (dua) sks yang tersusun sebagai berikut.

Modul 1. Konsep Dasar Dan Tujuan Pembangunan

- KB 1. Konsep Dasar dan Tujuan Pembangunan
- KB 2. Perencanaan Pembangunan Nasional

Modul 2. Sasaran Dan Tindak Lanjut Pembangunan Nasional

- KB 1. Sasaran dan Tindak Lanjut Pembangunan Nasional
- KB 2. MDGs, Sistem Pembangunan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan, serta MP3EI

Modul 3. Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional

- KB 1. Pengertian Sumber Pembiayaan Pembangunan
- KB 2. Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan di Indonesia

Modul 4. Otonomi Daerah

- KB 1. Otonomi Daerah
- KB 2. Pembangunan Kawasan

Modul 5. Instrumen Pembiayaan Pembangunan

- KB 1. Instrumen Pembiayaan Pembangunan
- KB 2. Pembiayaan Kawasan Perbatasan, Pulau Terluar, dan Perkotaan
- KB 3. Pembiayaan Pelayanan dan Fasilitas Publik

Modul 6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD

- KB 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
- KB 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat menyusun rancangan pembiayaan pembangunan bagi program pembangunan wilayah dan kota yang berkelanjutan pada sektor publik maupun swasta berdasarkan kaidah teoritis, empiris, serta aturan normatif yang berlaku di Indonesia. Secara lebih khusus, Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan konsep dasar pembangunan
2. Menjelaskan tujuan dan arah pembangunan nasional
3. Menjelaskan tantangan pembangunan di Indonesia
4. Menjelaskan arah kebijakan bidang-bidang pembangunan pada RPJM 2010-2014
5. Menjelaskan perkembangan pola pembangunan di Indonesia
6. Menjelaskan proses perencanaan pembangunan di Indonesia
7. Menjelaskan sistem perencanaan pembangunan nasional;
8. Menjelaskan arah pembangunan nasional sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007
9. Menjelaskan bagaimana membangun sumberdaya manusia yang berkualitas
10. Menjelaskan upaya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
11. Menjelaskan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
12. Menjelaskan pembangunan kelautan untuk mewujudkan sasaran Indonesia sebagai negara kepulauan;
13. Menjelaskan Millennium Development Goals (MDGs);
14. Menjelaskan Sistem Pembangunan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan
15. Menjelaskan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
16. Menjelaskan sasaran pembangunan dalam kaitannya dengan pembiayaan pembangunan
17. Menjelaskan asas pembangunan dalam kaitannya dengan pembiayaan pembangunan
18. Menjelaskan pengertian sumber pembiayaan pembangunan;
19. Menjelaskan sasaran strategis pembangunan nasional
20. Menjelaskan pengertian pembangunan dalam kaitannya dengan sumber pembiayaan pembangunan
21. Menjelaskan sumber pembiayaan pembangunan yang umum digunakan di Indonesia.
22. Menjelaskan pengertian otonomi daerah;
23. Menjelaskan rencana pembangunan daerah jangka menengah
24. Menjelaskan tujuan pembangunan daerah
25. Menjelaskan pendekatan pada pembangunan daerah
26. Menjelaskan perencanaan pembangunan kawasan dan perkotaan
27. Menjelaskan pembangunan kawasan di perbatasan negara;
28. Menjelaskan pembangunan perkotaan.
29. Menjelaskan instrumen pembiayaan pembangunan
30. Menjelaskan pajak sebagai instrumen pembiayaan pembangunan;

31. Menjelaskan obligasi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan;
32. Menjelaskan kerjasama pemerintah swasta sebagai instrumen pembiayaan pembangunan;
33. Menjelaskan pembiayaan pembangunan kawasan perbatasan dan pulau terluar;
34. Menjelaskan pembiayaan pembangunan kawasan perkotaan;
35. Menjelaskan pengertian sektor publik;
36. Menjelaskan perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dan swasta
37. Menjelaskan proses penentuan anggaran sektor publik
38. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik.
39. Menjelaskan bagaimana melakukan evaluasi kebutuhan investasi.
40. Menjelaskan bagaimana melakukan pengendalian manajemen terhadap investasi sektor publik
41. Menjelaskan cara pertanggungjawaban APBN dan APBD;
42. Menjelaskan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003;
43. Menjelaskan prosedur pertanggungjawaban APBN dan APBD;
44. Menjelaskan prosedur pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berikut adalah susunan kompetensi dari matakuliah PWKL4406 Pembiayaan Pembangunan tersebut.

Peta Kompetensi

Pembiayaan Pembangunan/PWKL4406/2 sks

Setelah menyelesaikan Mata Kuliah PWKL4406 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN, Mahasiswa diharapkan dapat menyusun rancangan pembiayaan pembangunan bagi program pembangunan wilayah dan kota yang berkelanjutan pada sektor publik maupun swasta berdasarkan kaidah teoritis, empiris, serta aturan normatif yang berlaku di Indonesia

